B A B I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga sepakat menyatakan diri bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus diatur dengan sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun, praktik demokrasi dalam sejarah ketatanegaraan pemerintahan Indonesia mengalami ketidakstabilan karena selalu terjadi perubahan-perubahan sistem, mulai demokrasi parlemeter, demokrasi terpimpin, hingga demokrasi Pancasila. Sistem tersebut telah mengimplementasikan demokrasi secara berbeda sehingga terdapat hal-hal yang bersifat positif maupun hal-hal yang negatif dan bertentangan antara esensi demokrasi dengan pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, "sudah sewajarnya kekurangan tersebut mendapatkan kritik dari bebarapa kalangan terhadap pemerintahan yang berkuasa berkaitan dengan praktek demokrasi dan hasil-hasil yang dicapainya. Ketika pemerintah merespon sebaliknya, maka akan muncul perlawanan yang dapat menyebabkan terjadinya krisis politik dan pemerintahan. Seperti kasus pemerintahan Orde Baru,yaitu selama kurang lebih 32 tahun peran legislatif, eksekutif, dan yudikatif lebih cenderung berada satu tangan, sistem pemerintahan yang birokratik dan sentralistik menyebabkan terjadinya monoloyalitas. Rakyat tidak berani untuk mengambil prakarsa dan inisiatif mengemukakan gagasan dan berbeda pendapat. Apalagi mengoreksi kekeliruan atau kesalahan dan memperjuangkan hak-hak sebagai individu, anggota

masyarakat maupun warga negara. Rakyat tertekan dan bergerak melakukan perlawanan sehingga pada tahun 1998 jatuhnya kekuasaan rezim Orde Baru yang *elitis* dan *otoriter* oleh gerakan reformasi yang menuntut demokratisasi dalam berbagai dimensi kehidupan kemasyarakatan dan kebangsaan.

Reformasi yang dilakukan juga menimbulkan sejumlah ekses negatif terhadap kehidupan masyarakat dan bangsa. Kebebasan yang *kebablasan* tanpa kendali dan keteraturan serta kesewenangan (Davis dan Mayer, 2000:126), sehingga terjadi fenomena di masyarakat, yaitu manusia cenderung bertindak otoriter, arogan, egois, dan unjuk rasa yang anarkis, brutal, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas atau tidak santun sering menjadi santapan ketidaksetujuan mereka terhadap suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Banyak terjadi peristiwa atau fenomena yang menyimpang bahkan sama sekali *tidak demokratis*. "Sering terjadi demonstrasi yang berujung kerusuhan atau kebebasan pers yang berujung pada pertikaian dan saling membuka aib" (http://www.kencus.com/2009/05/transformasi), sehingga meruntuhkan karakter bangsa, hancurnya nilai-nilai moral dan nilai-nilai demokrasi. Dalam ha ini: 1) mudah berkembangnya tindakan kekerasan, seperti tampak dalam pelanggaran hak asasi manusia, 2) belum kuatnya penghargaan dan toleransi terhadap pluralisme serta mudah terjadinya konflik sosial (Sopiah, 2009: 185). Peran lembaga pendidikan (sekolah) dalam membina nilai-nilai demokrasi dan budaya demokrasi terlihat lemah. Sentuhan-sentuhan pendidikan termasuk proses pembelajaran terasa sangat dangkal dan kurang menyentuh makna perkembangan kepribadian peserta didik.

Mulai dari tingkat SD hingga SLTA, peserta didik telah dibiasakan untuk menjadi “anak mami” yang manis, manutan, dan dilarang bertanya. Ruang belajar telah berubah fungsi menjadi tembok pemasung yang membelenggu kebebasan berpikir, berkreasi, bernalar, berinisiatif, dan berimajinasi. Beratnya beban kurikulum yang mesti dituntaskan telah membuat proses belajar-mengajar menjadi kehilangan ruang berdiskusi, berdialog, dan berdebat, guru menjadi satu-satunya sumber belajar. Sedangkan, di tingkat perguruan tinggi, mahasiswa dibutakan dari persoalan-persoalan politik praktis, mesti berkutat memburu ilmu di puncak menara gading yang hendak dijadikan “robot” penguasa dalam mengejar ambisi pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa. Akibatnya, setelah lulus mereka menjadi asing ditengah-tengah rakyat, tidak paham bahasa rakyat. Dalam kondisi demikian, out-put pendidikan kita tidak mampu menginternalisasi dan mengapresiasi nilai-nilai demokrasi karena pikiran dan emosi mereka dijauhkan dari ruang berdialog maupun menghargai perbedaan pendapat sebagai salah satu esensi demokrasi. Demikian pula, iklim belajar di kelas berlangsung monoton, dan membosankan siswa.

Belajar dari pengalaman buruk semacam itu, maka dunia pendidikan perlu diberi ruang yang cukup untuk membangun budaya demokrasi bagi peserta didik, sehingga kelak mereka sanggup menjadi demokrat sejati yang punya rasa malu, rendah hati, berjiwa besar, toleran, memiliki landasan etik, moral, dan spiritual yang kokoh ketika bertarung dalam rimba politik. Banyak tantangan krusial dan perubahan global seiring dengan akselerasi keluar-masuknya berbagai kultur dan peradaban baru dari berbagai bangsa di dunia. Karena itu, ranah demokrasi jelas

akan ikut menjadi penentu citra, kredibilitas, dan akseptabilitas bangsa kita sebagai salah satu komunitas masyarakat dunia. Artinya, mau atau tidak, dunia pendidikan dalam mencetak sumber daya manusia yang bermutu dan profesional harus mempersiapkan generasi yang demokratis, sehingga memiliki sikap *resistence* yang kokoh di tengah-tengah "konflik peradaban" (*clash of civilization). Pertama,* sikap demokratis harus menjadi salah satu aspek yang hendak dicapai dalam tujuan pendidikan. *Kedua,* kurikulum yang diberlakukan harus memberikan ruang yang cukup bagi peserta didik untuk belajar menginternalisasi dan mengapresiasi nilai-nilai demokrasi dengan memberikan kemerdekaan untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan lewat debat, diskusi, dan adu argumentasi dengan tetap mengacu pada nilai kebenaran dan nilai luhur baku. *Ketiga,* para birokrat dan praktisi pendidikan dituntut "*good-will*"nya untuk memberikan teladan cara-cara berdemokrasi yang sehat. Dalam iklim masyarakat kita yang masih cenderung paternalistik, contoh dan tindakan nyata akan lebih bermakna ketimbang retorika maupun ucapan verbal lainnya.

Tidak kalah pentingnya, iklim demokrasi pun harus sudah mulai ditumbuhkan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga institusi pendidikan lebih maksimal mengembangsuburkannya. Apabila iklim demokrasi tumbuh secara kondusif yang pada gilirannya akan menjadi sebuah budaya *(culture),* maka rasa sakit hati, dendam, mencari-cari "kambing-hitam" akibat kekalahan dalam sebuah demokrasi tak akan terjadi, yang menang pun tidak akan selalu menepuk dada. Kalah-menang dalam demokrasi adalah wujud dinamika

yang indah dan niscaya bagi warga negara yang berkepribadian luhur dan demokratis.

Gambaran ideal manusia Indonesia yang berkepribadian luhur terdapat dalam tujuan pendidikan nasional yaitu :

> Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU No.20 Tahun 2003, Bab II pasal 3).

Dalam Undang-Undang tersebut, istilah demokrasi secara eksplisit dinyatakan sebagai tujuan akhir dari sistem pendidikan nasional di Indonesia, yaitu membentuk warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Selanjutnya dalam Amandemen UUD 1945, pasal 28C ayat 1 dinyatakan bahwa "setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia.

Dalam hal ini, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dengan memberikan kesempatan mengembangkan kemampuannya agar menjadi warga negara yang cerdas, berkarakter dalam bingkai masyarakat Indonesia yang maju, bersatu, rukun, damai, dinamis, toleran, sejahtera, adil dan makmur, dan bersikap demokratis. Aunurrahman (2009: 118) menyatakan bahwa "warga negara yang demokratis adalah warga negara yang menampilkan prilaku selalu menghormati dan memuliakan harkat dan martabat manusia dalam kehidupan

bersama". Prilaku atau sikap demokratis dalam kehidupan bersama orang lain, yaitu: bersikap adil dalam segala hal, menampilkan kebebasan yang bertanggung jawab, selalu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, menghargai dan menghormati sesama, dan mengutamakan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, prilaku dan sikap demokratis akan terbentuk melalui pendidikan demokratis. "Pendidikan bersentuhan langsung dengan pengembangan eksistensi manusia menjadi pilar utama untuk tumbuh dan berkembangnya demokrasi" (Sumantri, 2009:11), sehingga, pendidikan mampu melahirkan manusia-manusia "demokratis" (Zamroni, 2007: 155). Tanpa dengan manusia-manusia yang memegang teguh nilai-nilai demokrasi, masyarakat demokratis hanya akan merupakan impian belaka. Sebagaimana dikatakan Srijanti, dkk. (2009: 49), bahwa "kehidupan demokrasi tidak akan datang, tumbuh dan berkembang dengan sendirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara". Demokrasi memerlukan usaha nyata setiap warga negara dan perangkat pendukungnya dan dijadikannya demokrasi sebagai pandangan hidup (*way of life*) dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Ramayulis (2008:332) menegaskan bahwa "demokrasi adalah pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara"

Dengan demikian, pendidikan demokratis merupakan hal yag tidak dapat ditawar-tawar lagi untuk terus diupayakan, dilaksanakan melalui proses pembelajaran, baik melalui pendidikan sekolah (school- based civic education) maupun dalam pendidikan lingkungan masyarakat (Sapriya dan Winataputra,

2004 : 116). Dewey (dalam Zamroni, 2000:30), mengatakan bahwa “demokrasi adalah pandangan hidup yang dicerminkan dengan perlunya partisipasi dari seluruh warga yang sudah dewasa dalam membentuk nilai-nilai yang mengatur kehidupan bersama”. Dengan demikian, demokrasi adalah menetapkan dasar-dasar kebebasan dan persamaan terhadap individu-individu yang tidak membedakan asal, jenis, agama, dan bahasa dalam kehidupan bersama.

Oleh karena itu, demokrasi merupakan suatu fenomena yang sangat menarik untuk dicermati oleh semua pihak, lebih-lebih lagi oleh para pemimpin yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab besar untuk membawa masyarakat dan bangsanya mencapai kemajuan-kemajuan yang diharapkan sebagaimana kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dan diraih oleh bangsa-bangsa lain yang lebih maju. Kepekaan para pemimpin pada tingkat atas, sampai kepada para pemegang otoritas pada level bawah menjadi sangat penting, karena bilamana hal ini tidak mendapat perhatian secara sungguh-sungguh justru akan menjadi bumerang bagi upaya peningkatan kesadaran warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Disisi lain fenomena ini, akan memberikan manfaat sebagai peluang untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, yaitu kesadaran akan pentingnya keikutsertaan semua pihak untuk mendukung terwujudnya cita-cita bangsa yang menginginkan dan bahkan mendambakan kemajuan dalam situasi dan tatanan kehidupan yang kondusif, damai dan harmonis.

Tatanan kehidupan yang demokrasi itu sangat membutuhkan kultur demokrasi, yaitu suatu upaya pengembangan dan pembinaan nilai-nilai demokrasi

agar membudaya dalam kepribadian setiap warga negara. Sementara itu, unsur kultur demokrasi yang ditampilkan oleh masyarakat sipil masih lemah. Sebenarnya, kultur demokrasi merupakan suatu keharusan karena berkaitan dengan budaya politik. Menurut Winataputra dan Budimansyah (2007: 219-220) bahwa: "secara teoritik di Indonesia diperlukan pengembangan konsep *civic culture* atau budaya warga negara pancasila karena sangat erat kaitannya dengan perkembangan *democratic civil siciety* atau masyarakat madani pancasila sebagai masyarakat sipil yang demokratis". "Pemikiran bahwa budaya politik berkaitan dengan demokrasi telah meluas pengaruhnya dengan dipublikasikannya *"The Civic culture"* oleh Almond dan Verba, tahun 1963" (Inglehart, 2000: 91). Oleh karena itu, nilai-nilai demokrasi perlu disosialisasikan, diinternalisasikan, bahkan dibudayakan. Atau dengan ungkapan lain perlu dilakukan pembudayaan demokrasi kepada generasi dan khususnya para siswa melalui pendidikan dan pembelajaran di sekolah seperti Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Pembudayaan demokrasi adalah mensosialisasikan demokrasi kepada generasi muda maupun peserta didik (siswa) sehingga menjadi budaya.

Pembelajaran PKn yang syarat dengan nilai-nilai moral dan nilai-nilai demokrasi yang diterapkan di sekolah selalu berorientasi pada aspek kognitif dan kurang menyentuh aspek-aspek apektif, prilaku dan sikap siswa sehingga pembelajaran dirasakan kering dan kurang menarik. Metode pembelajaran yang cendrung doktriner dan monolog yang selama ini perlu ditinjau ulang dari segi karakter belajar dan tahap-tahap perkembangan peserta didik karena "membosankan" bahkan cenderung "tidak disukai" siswa karena tidak menantang

siswa secara intelektual maupun emosional serta belum sesuai dengan kebutuhan atau tingkat perkembangan siswa (Wahab, 2007:706). Pada hal, para siswa perlu dilatih bersikap demokratis di kelas sehingga terbentuklah budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari dengan memberikan pencerahan dalam pembelajaran PKn yang dimulai dari: penataan materi, metode dan model pembelajaran yang dialogis, menarik dan menyenangkan maupun skenario pembelajaran yang berpusat pada siswa (*student centered)* dalam mengembangkan ketiga aspek belajar (kognitif, apektif, dan psikomotor) dalam upaya mencapai tujuan dan hasil belajar PKn secara kaffah. Dengan ungkapan lain, terbinanya siswa sebagai warga negara yang baik *(good citizen)* yang yang cerdas, emosional dan sosial, memiliki keadaban demokratis (Rosyada, dkk.2007: 2-3).

Dengan tumbuh dan berkembangnya demokrasi yang pada akhir-akhir ini semakin mendapat sambutan dari semua pihak yang perlu didukung sehingga semangat yang berkobar untuk menuju kearah demokratisasi itu akan menjadi moment yang lebih baik. Prinsip ini sebenarnya tidak boleh terlepaskan dari pemantapan sikap yang menaruh respek serta penghormatan pada demokrasi dan hak asasi manusia sehingga tatanan kehidupan warga negara selalu dalam koridor nilai-nilai demokrasi.

Nilai-nilai demokrasi tidak dapat berkembang sendiri tanpa didukung oleh komponen-komponen kehidupan lain yang kondusif dan secara sadar harus pula diupayakan untuk dipelihara dan ditumbuhkembangkan di dalam kehidupan masyarakat. Salah satu komponen pendukung demokrasi adalah perdamaian.

APNIEVE (1998: 56) mengatakan bahwa “demokrasi tidak mungkin tanpa perdamaian, dan perdamaian yang sebenarnya tidak mungkin tanpa demokrasi”.

Transisi demokrasi yang telah berlangsung beberapa waktu terakhir ini telah menunjukkan perubahan-perubahan yang signifikan di dalam kehidupan masyarakat dan rakyat Indonesia dan di dunia. Untuk itu, perlu perbaikan sistem politik demokrasi suatu pemerintahan. Perbaikannya meliputi dua hal, yaitu institusi (struktur) demokrasi dan perilaku (kultur) demokrasi. Menurut Winarno (2008:110-111) bahwa “kematangan budaya politik akan tercapai bila ada keserasian antara struktur dengan kultur”. Membangun masyarakat dan warga negara yang demokratis berarti usaha menciptakan keserasian antara *struktur* yang demokrasi dengan *kultur* yang demokrasi. Warga negara yang demokratis akan terwujud bila di negara tersebut terdapat institusi demokrasi dan sekaligus berjalannya prilaku demokrasi. Indonesia telah memiliki struktur atau institusi demokrasi menunjuk pada tersedianya lembaga-lembaga politik demokrasi yang siap seperti pemerintahan, parlemen, lembaga pemilu, organisasi politik, lembaga swadaya masyarakat, dan media massa yang terbuka dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Sedangkan kultur demokrasi merupakan budaya demokrasi yang perlu dibangun dan dikembangkan dalam masyarakat melalui pendidikan.

Budaya adalah sikap hidup manusia dalam hubungannya dengan alam dan lingkungan hidupnya (Ranjar, 2006:9). Parsons memandang budaya sebagai sistem sosial, artinya suatu proses interaksi di antara para pelaku sosial. Budaya

dianggap sebagai sistem sosial, karena mereka membentuk suatu keseluruhan yang bersatu dengan memperhatikan nilai-nilai, norma, dan tujuan serupa.

Untuk membudayakan nilai-nilai demokrasi diperlukan suatu teori. Karena itu, teori adalah ilmu pengetahuan empiric sebagai konsep dari apa yang ada pada mereka (Bachtiar, 2010:357). Parsons (dalam Lawang, 1986:114) mengemukakan teori yang umum sifatnya (general theory) mengenai tindakan sosial. Sistem budaya merupakan orientasi nilai dasar tentang nilai-nilai demokrasi yang akan disosialisasikan maupun diinternalisasikan dan pola normatif merupakan pembentukan prilaku atau sikap demokratis yang diinternalisasikan dalam struktur kepribadian para peserta didik. Norma sikap demokratis diwujudkan dalam hubungan sosial atau interaksi sosial masing-masing peserta didik.

Pandangan Parsons tentang tindakan manusia itu bersifat voluntaristik, artinya karena tindakan itu didasarkan pada dorongan kemauan, dengan mengindahkan nilai, ide dan norma yang disepakati. Tindakan individu manusia memiliki kebebasan untuk memilih sarana (alat) dan tujuan yang akan dicapai itu dipengaruhi oleh lingkungan atau kondisi-kondisi, dan apa yang dipilih tersebut dikendalikan oleh nilai dan norma (Wagiyo, 2007)

Oleh karena itu, pendidikan dihadapkan pada tuntutan yang semakin berat, terutama dalam mempersiapkan peserta didik sebagai warga negara untuk mampu menghadapi berbagai dinamika perubahan yang berkembang seperti pergeseran aspek nilai dalam kehidupan masyarakat. Semua bentuk perubahan ini tentu membawa konsekuensi logis, yaitu sekurang-kurangnya warga negara harus mampu memahami adanya berbagai kecenderungan perubahan tersebut, mampu

menyesuaikan diri, bahkan berperan dalam mendorong terjadinya perubahan-perubahan yang positif. Diharapkan, setiap warga negara tersebut tidak terjerat pada pergeseran nilai yang menjurus ke arah perubahan negatif dan merugikan diri sendiri, yaitu "manusia menjadi cenderung bertindak otoriter, arogan, egois individualistik, materialistis, sekuler, mendewakan ciptaannya sendiri serta lupa dan bahkan bersombong diri terhadap Maha Penciptanya.

Ditambah lagi "hilangnya keberpihakan negara pada nilai-nilai keadilan dan padamnya ketaatan pada hukum, berkembang menjadi salah satu persoalan serius yang mengancam keberlangsungan demokrasi di negeri ini" (LP3 Unmuh, 2002: 2). Demikian pula, peran lembaga pendidikan dalam membina nilai-nilai demokrasi dan budaya demokrasi terlihat lemah. Sentuhan-sentuhan pendidikan termasuk proses pembelajaran terasa sangat dangkal dan kurang menyentuh makna-makna sesungguhnya terutama terhadap perkembangan kepribadian peserta didik.

Mencermati berbagai kecenderungan yang dikemukakan di atas, *pendidikan umum* melihat bahwa pengembangan potensi-potensi individu harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu. Jika dipandang dari kelahirannya pendidikan umum hadir sebagai reaksi terhadap dan adanya spesialisasi yang berlebihan dan pada gilirannya menjadikan "pendidikan cenderung lebih peduli pada pengembangan satu aspek kepribadian tertentu saja, bersifat partikular dan parsial" (Henry, 1952: 2). Artinya adanya fragmentaris kurikulum, tidak ada kesatuan pengalaman siswa, cenderung mengabaikan kemanusiawian siswa, ada nilai-nilai esensial yang hilang dan mengembangkan hal-hal yang bersifat teknis.

Oleh karena itu, pendidikan umum mengambil tanggung jawab mengembangkan peserta didik dalam lingkup skala yang lebih luas, baik berkenaan dengan nalar-nalar emosional, sosial, dan nilai-nilai maupun intelektual. Dengan ungkapan lain, ”pendidikan umum (general education) didefinisikan sebagai *process of engenering essential meaning”* (Phenix, 1964: 5-6). Sedangkan Tim Senat Universitas Conecticut-USA, pada tanggal 12 Mei 2003 bahwa telah menyetujui sebuah definisi yang komprehensif mengenai general education sebagai berikut:

> Pendidikan umum adalah pendidikan yang memiliki cakupan yang luas dalam ilmu pengetahuan dan memerlukan kemampuan intelektual yang baik, keahlian estetik serta pencapaian prestasi dalam kemanusiaan. Pendidikan umum terdapat pemahaman dan apresiasi terhadap keberagaman jenis ilmu pengetahuan (ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, politik, humaniora, sejumlah aplikatif dan seni). Kajian-kajian pendidikan umum memandang bahwa pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang terlalu sempit dan terlalu dibatasi oleh sekat-sekat keahlian tertentu saja tidak lagi memadai untuk menanggapi dan menjawab berbagai realitas persoalan yang demikian dinamis dan kompleks.

Dalam keadaan demikian kemampuan-kemampuan personal, etika, nilai, moral dan studi-studi integratif merupakan keseluruhan yang sangat dibutuhkan pada setiap tahapan pendidikan. Oleh sebab itu, pendidikan umum memandang upaya-upaya pendidikan harus meningkatkan kesatuan yang komprehensif untuk meningkatkan kemampuan intelektual-rasional (kognitif), keterampilan dalam arti yang luas (psikomotor), dan kemampuan emosional atau perasaan, serta kesadaran tentang nilai-nilai.

Menurut Rokeach (1973:5), bahwa nilai adalah:

> A*n enduring bilief* (suatu keyakinan abadi) dan *mode of conduct or end-state of existence* (yang menjadi rujukan bagi cara bertingkah laku atau tujuan akhir eksistensi) serta *conception of the preferable* (yang merupakan konsepsi yang lebih baik) maupun *that is personally or socially preferable*

(tentang segala sesuatu yang secara personal dan sosial dipandang lebih baik).

Selanjutnya Shaver dan Strong (1982:17) mendefinisikan nilai sebagai:

> *Oour standards and principles for judging worth. They are the criteria by whice we judge "things" (people objects, ideas, actions, and situations) to be good, wortwile, desirable; or in the other hand, bad, wortless, despicable; or, of course, somewhere ini between these extremes*.

Berdasarkan pengertian ini, nilai adalah sejumlah ukuran dan prinsip-prinsip yang kita gunakan untuk menentukan keberhargaan sesuatu. Standard dan prinsip-prinsip tersebut digunakan untuk menilai segala sesuatu (baik itu orang, objek, gagasan, tindakan, maupun situasi) sehingga hal-hal tersebut bisa dikatakan baik, berharga, dan layak; dan atau tidak baik, tidak berguna dan hina, atau segala sesuatu yang berada di antara titik ekstrim keduanya. Dalam hal ini, Elmubarok (2008:7) membagi bahwa "nilai dalam 2 (dua) kelompok yaitu (1) nilai-nilai nurani (*values of being*) dan (2) nilai-nilai memberi (*values of giving*)". Nilai-nilai nurani adalah nilai yang ada dalam diri manusia yang kemudian berkembang menjadi perilaku serta cara memperlakukan orang lain. Contoh: kejujuran, keberanian, cinta damai, keandalan diri, dan lain-lain. Sedangkan nilai-nilai memberi adalah nilai yang perlu dipraktikkan atau diberikan yang kemudian akan diterima sebanyak yang diberikan. Contoh: setia, dapat dipercaya, hormat, cinta, kasih sayang, dan lain-lain. Meskipun terdapat berbagai persepsi atau pandangan yang seringkali berbeda tentang arti atau konsep nilai, namun secara umum dapat dipahami bahwa nilai sangat berperan di dalam menentukan cara pandang, perilaku, motivasi, bahkan menentukan kualitas hidup, arah atau tujuan seseorang. Gleeson (1997: 10) mengungkapkan bahwa "nilai adalah sesuatu yang berharga

dan demi nilai ini seseorang bersedia menderita, berkorban, mempertahankan, dan bahkan bersedia mati". Bahkan Sauri (2008:28) menegaskan bahwa nilai adalah suatu keyakinan mengenai cara bertingkah laku dan tujuan akhir yang diinginkan individu, dan digunakan sebagai prinsip atau standar dalam hidupnya". Sebagaimana yang ditegaskan oleh Frankel (1977:6), bahwa "nilai adalah sebagai *an ide a concept about what someone thinks is important in life"*. Nilai artinya suatu gagasan atau konsep tentang segala sesuatu yang diyakini seseorang penting dalam kehidupan. Sebagai contoh: kebebasan dan tanggung jawab adalah suatu gagasan atau konsep yang dipandang penting bagi kehidupan demokrasi oleh hampir semua orang. Zamroni (2001) mengatakan bahwa pengetahuan dan kesadaran akan nilai demokrasi itu meliputi tiga hal:

> 1) kesadaran bahwa demokrasi adalah pola kehidupan yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat itu sendiri, demokrasi adalah pilihan terbaik diantara yang buruk tentang pola hidup bernegara, 2) demokrasi sebuah *learning proses* yang lama dan tidak sekadar meniru dari masyarakat lain, 3) kelangsungan demokrasi tergantung pada keberhasilan mentransformasikan nilai-nilai demokrasi pada masyarakat.

Pendidikan begitu penting perannya membantu dan mengarahkan peserta didik mengembangkan kapasitas kemampuan intelektual dan kepribadiannya. Bahkan sekolah merupakan suatu sistem sosial manusia yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Menurut Dewey dalam (Zamroni, 2007: 155), bahwa :

> *Democracy has to be born a new in each generation and education is its midwife'*. Secara lebih umum, Plato dan Aristoteles menyatakan :" Bagaimana keadaan negara, begitulah keadaan sekolah", " Apa yang kamu inginkan untuk negara, kamu harus juga menyediakan untuk sekolah". Oleh karena itu, sekolah merupakan lembaga yang strategis menumbuhkembangkan nilai-nilai demokrasi sehingga terbentuk sikap warga negara yang demokratis.

Melalui upaya pendidikan di sekolah, diharapkan akan terlahir kualitas generasi masa depan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas secara emosional, spiritual, dan sosial. Sebagaimana yang dikatakan Sauri (2002;49), bahwa ”sebagai institusi sosial, sekolah memiliki peranan dan fungsi tersendiri”. Sekolah berperan membimbing, mengarahkan siswa untuk mengenal, memahami, dan mengaktualisasikan pola hidup yang berlaku dalam masyarakat. Tirtahardja (1994: 18), juga menegaskan bahwa “beranjak dari filosofi, maka setiap anak atau siswa dikarunia benih untuk bergaul, dan dapat saling berkomunikasi yang pada hakikatnya terkandung unsur saling memberi dan menerima”. Dengan demikian, pendidikan yang diselenggarakan di sekolah mampu menopang tumbuhnya iklim *civil society* (masyarakat madani) yang demokratis di Indonesia. Sesuai dengan makna pendidikan sebagai proses yang sadar dan terencana, dan sosialisasi nilai-nilai demokrasi dilakukan secara terencana, terprogram, terorganisasi. Semuanya ini merupakan kegiatan pendidikan yang mengarah pada terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya yang berkepribadian. Subarkah (2009), mengatakan bahwa “kini tumbuh kebutuhan baru untuk mencari bentuk pendidikan politik dalam bentuk pendidikan kewarganegaraan yang lebih cocok untuk latar pendidikan”, sehingga diharapkan benar-benar dapat meningkatkan kedewasaan seluruh warganegara yang mampu berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan cita-cita, nilai dan prinsip demokrasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi di Indonesia.

Namun kenyataannya bahwa “praktik pelaksanaan pendidikan di sekolah masih seringkali terdapat persepsi keliru bahwa upaya pengembangan aspek-aspek nilai ini hanya merupakan kewajiban guru-guru bidang studi tertentu saja” (Saad, 2001: 30), sehingga ada guru-guru yang mengasuh bidang studi yang lain merasa bahwa mereka hanya bertanggung jawab mengajarkan materi pelajaran yang menjadi muatan bidang studi yang diajarkannya saja. Sesungguhnya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh semua sekolah dan guru, dan itu berarti sangat keliru jika guru hanya bertanggung jawab menyampaikan materi pelajaran pada bidang studinya saja. Pada hal, setiap guru memegang peranan strategis terutama dalam upaya membentuk watak bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai demokrasi peserta didiknya secara kaffah.

Meskipun pengembangan nilai-nilai demokrasi secara keseluruhan menjadi tanggung jawab semua guru, kepala sekolah bahkan seluruh pengurus sekolah, tentu guru-guru agama dan dan khususnya guru-guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki tanggung jawab yang lebih besar dan spesifik. Sapriya dan Winataputra (2004 : 117) menjelaskan bahwa “arah pengembangan pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk mengembangkan kehidupan yang demokratis”. Dalam hal ini dilakukan dengan cara merangsang partisipasi aktif warga negara dalam masyarakat dan membelajarkan kemampuan pengambilan keputusan politik dalam sistem demokrasi konstitusional. Sejalan dengan itu, Sopiah (2009: 184) mengatakan bahwa “pengembangan PKn ke depan sebagai pendidikan demokrasi (seperti tampak pada kurikulum 2006)”, dan tidak hanya

sebatas mengembangkan warga negara yang demokratis, tetapi juga hendak mengembangkan pemberdayaan warga negara *(citizen empowerment)*, memfungsikan sebagai pendidikan *multicultural*, memperkokoh nasionalisme dengan menekankan pendekatan *political nation* untuk melengkapi pendekatan lama *political nation*. Pendidikan demokrasi melalui PKn difokuskan pada peletakkan dasar yang kokoh bagi berkembangnya *civil society* sebagai basis negara demokrasi.

Demikian pula, Veldhuis (1998) menyatakan bahwa "keberhasilan demokrasi umumnya ditentukan partisipasi masyarakat dalam proses dan dalam respon dari sistem kebutuhan yang populer". Lebih lanjut dikatakannya, bahwa warga negara yang demokratis tidak dilahirkan melainkan diciptakan (dibuat) dalam proses sosialisasi tentang nilai-nilai tersebut sehingga menjadi manusia yang berharga atau bernilai.

Dengan demikian, demokrasi harus dipelajari dan perlu dipelihara serta diwariskan kepada dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal ini adalah tugas praktisi pendidikan atau guru, dan juga ahli politik dan pemerintahan baik melalui lembaga kemasyarakatan maupun lembaga persekolahan. Oleh karena itu, sangatlah tepat bahwa "tugas pendidikan di sekolah secara substantif menyangkut sosialisasi, diseminasi, dan aktualisasi konsep, sistem, nilai, budaya, dan praktik demokrasi melalui pendidikan" (Azra, 2001), sehingga bertujuan mempersiapkan dan penumbuhan sikap warga negara yang demokratis. Untuk hal itu, "nilai-nilai demokrasi harus disemaikan, ditanamkan dan dipupuk dan dibesarkan melalui upaya-upaya terencana, teratur dan terarah pada seluruh lapisan masyarakat atau

warga negara" (Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah, 2002:i), dan "nilai-niai demokrasi sesungguhnya sangat diperlukan untuk mengembangkan kehidupan yang demokratis" (Aunurrahman, 2009 : 120).

Berdasarkan dari paparan pada bagian latar belakang ini maka dapat dipahami bahwa, (1) pendidikan dan pembelajaran memainkan peran penting dalam membentuk sikap warga negara yang demokratis, yaitu warga negara yang mampu hidup bersama dalam suasana kebebasan, kedamaian, kekeluargaan dan keharmonisan. Namun dalam kenyataannya, ternyata pendidikan belum mampu merealisasikan peran tersebut. Hal ini terbukti dari historis sejarah kepemimpinan nasional yang memasung nilai-nilai demokrasi (32 tahun pemerintahan ORBA). (2) Pembelajaran kooperatif sebagai pendekatan pembelajaran dimaksudkan untuk mengedepankan pola pembelajaran yang berpusat pada siswa (*student centered*) guna mengurangi atau paling tidak menyeimbangkan peran guru dan siswa dalam pembelajaran PKn. Namun, selama ini, pembelajaran PKn cenderung berpusat pada guru dengan teknik ceramah, dan tanya jawab sehingga kurang optimal terjadi interaksi edukatif yang intensif, baik antara siswa dengan guru, maupun siswa dengan sesama siswa dan dengan lingkungan pembelajaran. Pada hal, bila dilihat dari dimensi tujuan pembelajaran PKn, maka pola pembelajaran yang ideal dikembangkan adalah membelajarkan siswa agar mereka memahami nilai-nilai moral termasuk nilai-nilai demokrasi sehingga mampu menerapkannya atau mengimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari. (3) SMAN 1 Pontianak sebagai salah lembaga pendidikan sesungguhnya bertanggung jawab dalam membentuk atau membina siswa dan output pendidikan yang mampu

mengaplikasikan nilai-nilai demokrasi dalam prilakunya sehari-hari, namun selama ini yang dipraktikkan di SMAN 1 Pontianak belum begitu kondusif bagi pembinaan nilai-nilai demokrasi.

Untuk mencapai hal tersebut, guru harus berupaya membelajarkan siswa melalui pembelajaran kooperatif yang sangat cocok dan terbaik untuk mengarahkan, menggerakkan, dan membimbing siswa dalam mengembangkan nilai-nilai demokrasi sehingga diharapkan akan tumbuh sikap warga negara yang demokratis dalam kehidupan sehari-hari bersama orang lain.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan paparan di atas maka permasalahan utama dalam peneitian ini adaaha, " Model Pengembangan Nilai-Nilai Demokrasi Melalui Pembelajaran Kooperatif yang bagaimanakah yang dapat menumbuhkan sikap warga negara yang demokratis dalam pembelajaran PKn ? " Dari permasalahan utama tersebut selanjutnya dirinci menjadi beberapa pertanyaan penelitian, yaitu :

1. Bagaimanakah proses dalam upaya mengembangkan nilai-nilai demokrasi yang termuat dalam kurikulum PKn bagi upaya menumbuhkan sikap warga negara yang demokratis ?
2. Bagaimanakah mengembangkan skenario pembelajaran kooperatif dalam pengembangan nilai-nilai demokrasi kepada siswa ?
3. Aktivitas-aktivitas apa sajakah yang dilakukan siswa dalam pembelajaran kooperatif untuk membentuk sikap yang demokratis ?
4. Sarana dan media apa sajakah yang menunjang dalam pembelajaran kooperatif untuk pengembangan nilai-nilai demokrasi ?

5. Bagaimanakah proses evaluasi bagi penentuan keberhasilan kegiatan pembelajaran demokrasi terhadap siswa di sekolah ?
6. Bagaimanakah hasil pengembangan nilai-nilai demokrasi bagi upaya menumbuhkan sikap siswa yang demokratis ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan model pengembangan nilai-nilai demokrasi melalui pembelajaran koperatif untuk menumbuhkan sikap warga negara yang demokratis. Secara khusus tujuan penelitian ini, yaitu ingin mengetahui:

1. Proses dalam upaya mengembangkan nilai-nilai demokrasi yang termuat dalam kurikulum PKn bagi upaya menumbuhkan sikap warga negara yang demokratis
2. Skenario pembelajaran kooperatif dalam pengembangan nilai-nilai demokrasi kepada siswa.
3. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan siswa dalam pembelajaran kooperatif untuk membentuk sikap yang demokratis.
4. Sarana dan media yang menunjang dalam pembelajaran kooperatif untuk pengembangan nilai-nilai demokrasi.
5. Hasil pengembangan nilai-nilai demokrasi bagi upaya menumbuhkan sikap siswa yang demokratis.
6. Proses evaluasi bagi penentuan keberhasilan kegiatan pembelajaran demokrasi terhadap siswa di sekolah.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil-hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak:

1. Bagi pengembangan ilmu: Kontribusi Keilmuan Pendidikan Umum pada tataran konseptual, penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran dalam mengkonstruksi atau menyusun muatan nilai yang idealnya tercakup pada program pendidikan umum/nilai. Kemudian pada tataran praktikal, model yang dihasilkan melalui penelitian ini diharapkan bisa membantu proses dan cara-cara melakukan pembelajaran pada pelaksanaan pendidikan umum.
2. Bagi sekolah hasil penelitian ini memberikan masukan-masukan bagi upaya-upaya perbaikan dan penyempurnaan kegiatan-kegiatan pembelajaran, terutama dalam mengembangkan inovasi atau model pembelajaran, dan lebih khusus mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam upaya menumbuhkan sikap warga negara yang demokratis. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi salah satu bahan kajian guna mengembangkan model-model pembelajaran yang lebih dinamis dan inovatif sesuai dengan peran yang diemban oleh sekolah.
3. Bagi guru, khususnya guru PKn bahwa hasil penelitian ini dapat menambah nuansa baru, terutama dalam melaksanakan praktik pembelajaran yang memberikan penekanan lebih mendalam pada keaktifan siswa serta penekanan pada bentuk pembelajaran yang diarahkan untuk mengembangkan aspek-aspek kognitif, afektif, dan psikomotor siswa.

4. Bagi para peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi data dan informasi awal untuk ditindaklanjuti dalam berbagai bentuk penelitian dan pengembangan lanjutan dalam ruang dan kajian yang lebih luas.

E. METODE PENELITIAN

Penelitian ini lebih dititikberatkan pada upaya untuk mengkaji suatu proses dan fenomena secara menyeluruh dan saling terkait. Pendekatan utama yang digunakan adalah kualitatif. Mcmillan dan Schumacer (2001 : 398) mengatakan bahwa "penelitian kualitatif didasarkan pada realitas merupakan sesuatu yang bersifat ganda, saling berinteraksi, dan didalamnya terjadi pertukaran pengalaman-pengalaman sosial, dan yang diinterpretasikan oleh setiap individu". Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kuantitatif sehingga metode yang digunakan adalah *"Research and Development (R&D)* dari Borg" (1981 : Gall, Gall & Borg, 2003). Model penelitian dan pengembangan adalah *"a process used develop and validate educational product"*. Artinya suatu proses pengembangan dan memvalidasi hasil dari praktik-praktik pendidikan.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk membuat dan mengimplementasikan model pengembangan nilai-nilai demokrasi melalui pembelajaran kooperatif untuk menumbuhkan sikap warga negara yang demokratis.

Oleh karena itu, prosedur penelitian dan pengembangan dilakukan melalui beberapa langkah secara berurutan, mulai dari mengumpulkan hasil-hasil penelitian dan informasi, merencanakan bentuk penelitian yang akan dikembangkan, mengembangkan prototype awal, mengadakan uji coba terbatas,

merivisi model, melakukan ujicoba lapangan, melakukan revisi produk, melakukan uji coba lapangan secara operasional, melakukan revisi akhir terhadap model, hingga melakukan desimenasi dan penyebaran.

F. LOKASI PENELITIAN DAN SUBYEK PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

   Penelitian ini dilakukan Kelas XI Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pontianak yang terletak di Jalan Kalimantan Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.

2. Subyek penelitian

   Subyek dalam penelitian ini terdiri dari : a) Para siswa, b) Guru-guru Pendidikan Kewarganegaraa (PKn), dan c) Kepala Sekolah

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA PERPUSTAKAAN